

ABSTRAK

Pendayagunaan sumber daya alam secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan tetap mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pemanfaatan sumber daya alam perlu memperhatikan aturan-aturan bahwa daya guna dan hasil guna yang dikehendaki harus dilihat dalam batas-batas yang optimal, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya lain yang berkaitan dengan ekosistem dan memberikan kemungkinan untuk mengadakan pilihan penggunaan dalam pembangunan di masa mendatang.

Kegiatan pengusahaan hutan, sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kehutanan pada khususnya, dituntut untuk dapat terlaksana secara profesional pula. Salah satu unsur yang turut berperan dalam menciptakan pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan secara profesional adalah berupa tersedianya informasi secara benar dan memadai. Arus informasi yang lancar sangat diperlukan oleh pihak manajemen badan usaha pengusahaan hutan maupun oleh pihak pemerintah yang berwenang untuk melakukan pembinaan. Salah satu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang perkembangan badan usaha pengusahaan hutan adalah berupa Laporan Keuangan.

Dalam era yang semakin maju ini konsumen-konsumen di berbagai penjuru dunia semakin kritis terhadap produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Produk-produk yang ramah lingkungan (*green products*) telah memiliki tempat khusus dalam hati konsumen. Keadaan seperti ini jelas mengisyaratkan bahwa kini bukan saatnya lagi mengandalkan bahan baku dari hutan alam. Maka pilihannya sudah pasti mengembangkan produk-produk perkayuan ataupun non kayu yang menggunakan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri. Pengembangan produk-produk dari hutan tanaman industri layak menjadi primadona karena perusahaan memiliki kendali atas bahan baku bagi produknya. Hal ini berbeda dengan hutan alam. Pada hutan alam badan usaha tidak memiliki kendali atas bahan baku dan pengusahaan hutan alam juga tidak bersahabat dengan lingkungan yang kini telah menjadi isu global.

Kehadiran laporan keuangan seperti yang disebutkan sebelumnya tidak lantas dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Harus diketahui bahwa bidang usaha pengusahaan hutan adalah salah satu bidang usaha yang sediaannya mengalami akresi.

Akresi adalah perubahan baik itu pertambahan maupun pengurangan karena proses yang bersifat alamiah.

Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh akresi ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi, meringkas dan mengungkapkan informasi mengenai perubahan nilai produk akibat akresi dalam laporan keuangan karena nilai produk tidak dapat direalisasikan sampai pertumbuhan fisik atau proses alamiah tersebut berakhir. Biasanya akresi berakhir setelah melewati beberapa periode akuntansi dan memberikan manfaat ekonomi bagi badan usaha.

Badan usaha perusahaan hutan yang melaksanakan beberapa kegiatan perusahaan hutan termasuk HTI, harus menyajikan biaya yang ditanggungkan dalam pelaksanaan pembangunan HTI terpisah dari biaya ditanggungkan lainnya dalam akun tersendiri yaitu "HTI dalam pengembangan". Akun ini disajikan di neraca setelah aktiva lancar dan sebelum aktiva tetap.

Pada Hutan Tanaman Industri, biaya bunga pinjaman yang terjadi dikapitalisasi selama masa satu daur sebagai "HTI dalam pengembangan" dan diamortisasi selama masa konsesi sebagai biaya produksi.

Perlakuan akuntansi yang layak akibat terjadinya akresi tersebut bersifat kritis. Tidak tampaknya pengaruh akresi mengakibatkan tidak riilnya posisi keuangan dalam neraca dan kinerja badan usaha dalam laporan laba rugi. Keadaan tersebut tentu akan berbuntut pada kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang berdasarkan laporan keuangan.